

STUDI KEBIJAKAN PUBLIK : REVITALISASI PASAR KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah kondisi fisik bangunan pasar Kajen yang sudah dianggap tidak mampu menampung jumlah pedagang sehingga memerlukan perbaikan agar dapat menjadi tempat belanja tradisional yang nyaman dan aman. Masalah yang muncul : Mengapa kebijakan revitalisasi pasar Kajen pada pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah? Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya masalah dalam kebijakan tersebut?

Dalam penelitian menggunakan teori evaluasi dalam kebijakan publik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kebijakan revitalisasi pasar Kajen digunakan teori kebijakan publik serta teknik analisis SWOT untuk menganalisis kebijakan revitalisasi pasar Kajen. Obyek dalam penelitian ini adalah pasar Kajen, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pekalongan, bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan serta PT. Tika Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar Kajen ditentang oleh pedagang pasar Kajen dengan alasan lamanya waktu pembangunan pasar, pedagang lama pasar Kajen yang tidak mendapat prioritas dalam mendapatkan kios dan loos strategis serta penentuan bentuk bantuan yang cocok bagi pedagang pasar Kajen. Masalah-masalah tersebut akhirnya dapat terselesaikan dengan negosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Kebijakan Revitalisasi Pasar Kajen, Negosiasi.

STUDY PUBLIC POLICY : REVITALIZATION OF KAJEN'S MARKET AT PEKALONGAN REGENCY

Abstract

Based by the phsycally construction condotions of Kajen's market is in capable to accommodate the traders number, so that it could be required an improvement being a traditional market which is clean and secure. The problem is : Why the revitalization policies of Kajen's market on its implementation raises problems? What factors are underlying the emergence of problems in the policy ?

This research used the evaluation theory of public policy and strenght, weakness, opportunity, and threat (SWOT) analysis technique for analyzing about the revitalization policies of Kajen's market. The object of this research are Kajen's market, Departement of Industry and Trade, Cooperation and Micro Small Medium Enterprise, Law Division in Secretariat of Pekalongan Regency, Regional Legislative Assembly in Pekalongan Regency and PT. Tika Jaya.

The results show that the revitalization policies are opposed by traders because the development of Kajen's Market was slow, the old traders are not given priority in distribution of stall, loose strategic, and determining the appropriate assistance for traders. The problems are resolved with negotiations facilitated by District Government of Pekalongan.

Keyword : Public policy, Revitalization policies of Kajen's Market, Negotiate

Pendahuluan

Pembangunan sarana dan prasarana di Kajen semakin meningkat seiring dengan berubahnya status Kajen menjadi ibukota Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2001 yang lalu. Pembangunan sarana dan prasarana diawali dari pembangunan kompleks perkantoran sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan, sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, beberapa kantor serta dinas yang dianggap penting serta pembangunan jalan-jalan utama di wilayah kompleks perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

Pembangunan ibukota Kabupaten Pekalongan diteruskan dengan pembangunan masjid Agung Al-Mukhtaram serta perbaikan beberapa pasar tradisional untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena itulah pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat kebijakan revitalisasi terhadap beberapa pasar tradisional di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Langkah revitalisasi pasar tradisional ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengubah citra buruk masyarakat terhadap pasar tradisional sebagai tempat belanja yang kumuh, kotor, dan tidak nyaman menjadi tempat berbelanja yang nyaman, bersih, dan rapi sehingga masyarakat menjadi kembali tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional daripada berbelanja di pasar swalayan. Upaya revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah pusat dianggap sebagai langkah yang tepat mengingat pasar tradisional merupakan salah satu wujud pendapatan pemerintah daerah melalui retribusi pasar tradisional yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang juga melakukan revitalisasi pada beberapa pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan pertama kali dilaksanakan di dua pasar tradisional sekaligus yaitu pasar Karanganyar dan pasar Wonopringgo. Revitalisasi yang dilakukan di kedua pasar tradisional ini berjalan dengan lancar bahkan dapat dikatakan sukses dan menjadi contoh untuk revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan.

Pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan yang kemudian dipilih untuk direvitalisasi setelah pasar Karanganyar dan pasar Wonopringgo adalah pasar Kajen. Namun, pelaksanaan revitalisasi di pasar Kajen ternyata tidak sebaik seperti di dua pasar tradisional sebelumnya. Revitalisasi pasar Kajen memakan waktu sampai 3 tahun dalam pembangunannya. Pasar Kajen mulai dibangun pada tahun 2007 dan pembangunannya selesai pada tahun 2010 yang lalu. Kebijakan revitalisasi pasar Kajen pada pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah antara pihak-pihak yang terkait yaitu, pemerintah Kabupaten Pekalongan, PT. Tika Jaya sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk merevitalisasi pasar Kajen dan pedagang pasar Kajen yang diwakili oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pasar Kajen.

Metode Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini pada umumnya digunakan untuk meneliti berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial atau fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pekalongan tentang relokasi pedagang pasar Kajen dan data sekunder yang diperoleh dari berita-berita di koran daerah atau artikel yang berkaitan dengan pasar Kajen.

Narasumber – narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, bapak Muhammad Afib, S.Sos.
2. Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, bapak Bambang Supriyadi, SH. Mhum.
3. Kepala DPRD Kabupaten Pekalongan, bapak Asip Kholbihi, SH. M.Si.
4. Mantan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pasar Kajen, bapak Amin Dahlan.
5. Kepala Bagian Humas PT. Tika Jaya, bapak Sudriyo.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik disini adalah sebagai serangkaian tujuan dan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Kajen.

Proses atau tahapan yang dilalui juga sama, *agenda setting* dilakukan untuk menemukan prioritas masalah untuk ditetapkan suatu kebijakan yang digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam kaitannya dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di daerah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyeleksi beberapa pasar tradisional yang dianggap perlu untuk segera dilakukan pembangunan kembali atau revitalisasi karena berbagai latar belakang. Beberapa pasar tradisional yang pada waktu itu direncanakan untuk segera direvitalisasi antara lain, pasar Kajen, pasar Karanganyar dan pasar Wonopringgo. Proses pembangunan ketiga pasar ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari pasar Karanganyar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pasar Wonopringgo lalu diteruskan dengan pembangunan pasar Kajen. Pembangunan ketiga pasar ini secara umum memiliki latar belakang yang sama yaitu keadaan fisik atau bangunan pasar yang sudah tidak laik untuk digunakan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang serta untuk memperbaiki image buruk atau pandangan buruk dari masyarakat mengenai pasar tradisional yang merupakan tempat jual beli yang tidak nyaman, maka dari itu, dibuatlah kebijakan mengenai revitalisasi pada ketiga pasar ini secara bertahap, diawali dari revitalisasi pasar Karanganyar dan Wonopringgo terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan relokasi pasar Kajen.

Proses selanjutnya adalah *policy formulation* (formulasi kebijakan), disini proses perumusan kebijakan mengenai pembangunan, relokasi pedagang dan penempatan kembali para pedagang pasar Kajen mulai dikembangkan dan ditentukan siapa saja pihak-pihak yang turut memiliki andil dalam perumusan tersebut.

Tahap atau fase selanjutnya adalah *policy adoption*, pada tahap ini perumusan mencapai pada kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. Kemudian *policy implementation*, tahap ini digunakan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pasar Kajen, analisis mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut juga sudah bisa dilihat dalam fase ini.

Tahap atau fase terakhir adalah *policy assessment atau evaluation*, pada tahap ini dilakukan pengukuran terhadap efektivitas atau dampak dari pelaksanaan kebijakan mengenai Pasar Kajen terutama pada saat revitalisasi dilaksanakan.

2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dilakukan untuk menganalisis dampak yang muncul dari dilaksanakannya suatu kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini, analisis kebijakan digunakan untuk menganalisis dampak dari kebijakan revitalisasi pasar KAJEN yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Peneliti menggunakan teknik SWOT untuk menganalisis kebijakan revitalisasi pasar KAJEN Kabupaten Pekalongan. SWOT analysis merupakan sebuah teknik analisis yang dapat diterapkan dalam bidang apapun termasuk dalam menganalisis sebuah kebijakan. Teknik ini menggunakan empat hal dalam menganalisis, yaitu Strength (kelebihan/kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (kesempatan/peluang) serta Threats (ancaman/hambatan).¹

Pembahasan

Dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar KAJEN teknik analisis SWOT digunakan untuk menganalisis empat unsur yaitu, kekuatan dari kebijakan revitalisasi pasar KAJEN (Strength), kelemahan dari kebijakan revitalisasi pasar KAJEN (Weakness), peluang yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memaksimalkan pencapaian kebijakan revitalisasi pasar KAJEN (Opportunity) serta hambatan yang muncul yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar KAJEN.

a. Kekuatan Kebijakan Revitalisasi Pasar KAJEN (S/Strength)

Kekuatan atau kelebihan dalam kebijakan revitalisasi pasar KAJEN dapat dilihat dari seberapa efektifkah pelaksanaan revitalisasi pasar KAJEN untuk memecahkan masalah yang ada di pasar KAJEN.

Selama ini pedagang maupun pembeli atau konsumen selalu dihadapkan pada masalah yang sama setiap berdagang atau berbelanja di pasar tradisional termasuk pasar KAJEN yaitu tidak adanya kenyamanan dan keamanan saat berdagang atau berbelanja.

Kondisi fisik bangunan pasar yang sudah tidak laik menyebabkan beberapa kerusakan baik diluar bangunan maupun di dalam bangunan pasar KAJEN itu sendiri. Ditambah lagi dengan penataan pedagang yang tidak rapi semakin menambah suasana di dalam pasar KAJEN menjadi tidak nyaman. Kondisi yang tidak teratur ini juga terkadang membahayakan keamanan para pedagang dan konsumen.

Dengan segala ketidakteraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan revitalisasi pasar KAJEN. Revitalisasi pasar KAJEN ditujukan untuk memperbaiki bentuk fisik bangunan pasar KAJEN baik bangunan luar maupun bangunan di dalam pasar KAJEN. Dengan diperbaruinya gedung pasar KAJEN secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh pada pengaturan blok tempat dagang atau zoning dagang di pasar KAJEN. Zoning menjadi lebih rapi dan jelas sehingga memudahkan para pedagang maupun konsumen yang datang ke pasar KAJEN untuk berbelanja.

Perbaikan gedung pasar KAJEN dengan menjadikan pasar KAJEN dua lantai juga semakin memberikan nilai positif bagi revitalisasi pasar KAJEN. dengan tersedianya lantai atas maka para pedagang tidak perlu lagi berdesakan untuk memperoleh tempat dagangan yang layak dan tidak perlu ketakutan karena tidak mendapat tempat berjualan.

Dengan diaturnya para pedagang dengan rapi di dalam gedung pasar KAJEN secara langsung juga membuat tampilan pasar KAJEN menjadi lebih bersih dan tertata sehingga menambah jumlah konsumen yang datang ke pasar KAJEN untuk berbelanja dan dengan begitu juga akan berdampak pada retribusi pasar KAJEN yang semakin tinggi tiap tahunnya.

¹ Materi Kuliah Analisis Kebijakan pada hari Jumat 13 April 2012 pukul 07.30 WIB

b. Kelemahan dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar KAJEN (Weakness/W)

Kelemahan dalam kebijakan revitalisasi pasar KAJEN bukan terletak pada bentuk kebijakan dari revitalisasi itu sendiri melainkan terletak pada ketidaksiapan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyelesaikan permasalahan dengan pedagang pasar KAJEN. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah menyiapkan beberapa solusi alternatif bantuan bagi para pedagang ketika akan diadakan penempatan kembali pedagang pasar KAJEN. Pemerintah memberikan beberapa solusi alternatif bantuan bagi para pedagang berupa investasi non permanen namun ditolak oleh pedagang.

Pedagang menolak rencana pemberian bantuan investasi non permanen karena menganggap pemerintah Kabupaten Pekalongan justru menjerumuskan mereka untuk berhutang, sementara menurut pedagang penghasilan yang mereka dapatkan tidak tetap setiap harinya dan masih harus dipotong lagi untuk membayar hutang jika bantuan investasi non permanen tersebut dilaksanakan. Dengan alasan tersebut para pedagang menolak bentuk bantuan investasi non permanen tersebut.

Pada akhirnya pemerintah kembali menawarkan solusi alternatif bantuan bagi para pedagang pasar KAJEN melalui pembelian fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan membeli fasos dan fasum di pasar KAJEN sebesar 35% dari dana yang dikeluarkan PT. Tika Jaya, berarti pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membayar sebesar Rp. 6.650.000.000 dari keseluruhan biaya Rp. 19.000.000.000,-. Dalam negosiasi tersebut juga diputuskan untuk memilih Bank Surya Yudha sebagai bank Penjamin Pasar KAJEN. Itu berarti para pedagang masih harus mengangsur kepada bank Surya Yudha sebanyak 65% dari Rp. 19 milyar atau sebesar Rp. 12.350.000.000.

c. Peluang Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar KAJEN (Opportunity/O)

Peluang pemerintah yang dimaksud disini merupakan peluang atau kesempatan yang muncul pada pemerintah Kabupaten Pekalongan ketika kebijakan revitalisasi pasar KAJEN tersebut dibuat hingga berakhirnya pelaksanaan pembangunan pasar KAJEN.

Peluang yang muncul ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk semakin memaksimalkan pencapaian dari kebijakan revitalisasi pasar KAJEN.

Peluang pemerintah Kabupaten Pekalongan muncul ketika salah satu pasar yang terpilih dari seleksi beberapa pasar yang akan direvitalisasi adalah pasar KAJEN. Secara geografis pasar KAJEN terletak tepat ditengah-tengah wilayah Kabupaten Pekalongan. Letak yang sangat strategis mengingat ibukota Kabupaten Pekalongan baru saja dipindahkan ke KAJEN yang berarti berada satu kecamatan dengan pasar KAJEN yaitu kecamatan KAJEN.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan memanfaatkan peluang tersebut dengan menjadikan pasar KAJEN sebagai ikon atau perwujudan ibukota Kabupaten Pekalongan yang baru di KAJEN melalui pembangunan atau revitalisasi pasar KAJEN yang akan dilaksanakan.

Dengan ibukota yang baru dan ikon yang dibangun di pasar KAJEN, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap akan semakin banyak investor yang akan menanamkan modalnya di KAJEN di berbagai sektor atau bidang. Yang tentunya juga akan menambah nilai positif bagi Kabupaten Pekalongan karena pertumbuhan sektor ekonomi, pembangunan dan sosial yang pesat.

d. Hambatan dalam Kebijakan Revitalisasi Pasar Kajen (Threats/T)

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak hanya hambatan yang muncul saat pelaksanaan kebijakan revitalisasi atau pada saat pembangunan pasar Kajen sedang berlangsung, namun juga hambatan yang muncul dari awal proses pembentukan kebijakan revitalisasi pasar Kajen.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kebijakan revitalisasi pasar Kajen, antara lain :

- a. Rencana penyelesaian kebijakan revitalisasi pasar Kajen yang sempat mundur dua tahun karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 yang lalu.
- b. Penolakan pedagang ketika kebijakan awal mengenai relokasi pasar Kajen mulai disosialisasikan kepada para pedagang dengan alasan tempat relokasi yang terlalu jauh dari pusat keramaian kota Kajen. Karena penolakan tersebut akhirnya terjadi perubahan kebijakan dari kebijakan relokasi pasar Kajen menjadi kebijakan revitalisasi pasar Kajen.
- c. Penolakan para pedagang untuk menempati pasar darurat atau pasar sementara ketika pembangunan pasar Kajen sedang dilaksanakan.
- d. Pelaksanaan pembangunan pasar Kajen yang sempat terhenti satu tahun karena masalah internal dari pemborong.
- e. Masalah yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Tika Jaya sebagai investor dengan pedagang pasar Kajen mengenai bentuk solusi alternatif bantuan bagi pedagang pasar Kajen.

Dari berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, didapat beberapa faktor yang memengaruhi munculnya hambatan atau masalah tersebut, antara lain :

1. Pemkab Pekalongan melalui Dinperindagkop dan UMKM kurang responsif dalam menjalin hubungan yang baik dengan APPSI yang ada di seluruh Kabupaten Pekalongan bukan hanya di pasar Kajen.
2. DPRD Kabupaten Pekalongan kurang berperan aktif dalam negosiasi tentang bentuk bantuan terhadap pedagang pasar Kajen.
3. Sikap pedagang yang cenderung oportunis dan kurang kooperatif.

Kesimpulan

Kebijakan revitalisasi pasar Kajen ditentang oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pasar Kajen yang mewakili seluruh pedagang yang berada di pasar Kajen. Penentangan ini dilakukan oleh APPSI dengan beberapa alasan, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dianggap tidak mementingkan pedagang lama dalam pembagian kios dan loos bagi pedagang.
2. Pelaksanaan pembangunan yang mundur satu tahun dari rencana awal juga membuat pedagang sempat mengadakan aksi demonstrasi di depan sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
3. Penyelesaian masalah mengenai bentuk bantuan bagi pedagang yang dianggap merugikan bagi pedagang.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dianggap melakukan aksi pembiaran kepada pihak ketiga yang melakukan penjualan kios dan loos terhadap pedagang diluar data pedagang pasar Kajen. Hal ini akhirnya dapat terselesaikan dengan negosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan cara memprioritaskan pedagang lama yang sudah lebih dulu berada di pasar Kajen untuk menempati kios dan loos yang dianggap strategis di bangunan pasar Kajen yang baru.

Masalah lain muncul ketika pelaksanaan pembangunan pasar Kajen sempat terhenti selama hampir satu tahun karena masalah internal yang dialami oleh investor sehingga pembangunan pasar Kajen yang harusnya dapat terselesaikan dalam waktu satu tahun menjadi terlambat satu tahun atau selesai dengan dua tahun masa pembangunan pasar. Karena lamanya masa pembangunan, pedagang yang berada di lokasi sementara atau pasar darurat sempat mogok berjualan karena kondisi lokasi sementara atau pasar darurat yang sudah semakin rusak karena kurangnya pemeliharaan. Namun, seiring dengan selesainya pelaksanaan pembangunan bangunan pasar Kajen yang baru maka permasalahan mengenai lokasi sementara atau pasar darurat juga dapat terselesaikan.

Pedagang pasar Kajen kembali melakukan penentangan terhadap rencana pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan bentuk bantuan bagi pedagang pasar Kajen yang masih menjadi satu rangkaian dengan kebijakan revitalisasi pasar Kajen. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki pendapat yang berbeda dengan pedagang terkait dengan bentuk bantuan ini. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menginginkan bentuk bantuan yang dapat meringankan beban pedagang namun juga tidak menyulitkan bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri. Sedangkan pedagang pasar Kajen menginginkan bentuk bantuan yang tidak merugikan mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang aman.

Pada akhirnya, penyelesaian kebijakan revitalisasi pasar Kajen dapat terselesaikan dengan inisiatif pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengadakan negosiasi dengan pedagang dalam setiap masalah yang muncul sebagai dampak dari kebijakan revitalisasi pasar Kajen.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* (2nd ed.). Jakarta : PT. Buku Kita.

Dunn, William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Public Disobedience : Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta : Gava Media.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (4th ed.). Malang : Bayumedia Publishing.

Sukirno, Sadono. (2005). *Mikro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ekonomi 1. (2004). Bekasi : PT. Galaxy Puspa Mega.

Hennessy, Bernard dan Amiruddin Nasution (eds). (1990). *Pendapat Umum* (4th ed). Jakarta : Erlangga.

Sukirno, Sadono. (1981). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Bina Grafika.

Moleong, Lexy, J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Parsons, Wayne. Wibowo, Tri. 2006. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Mariana, Dede & Paskarina, Caroline. 2008. Demokrasi & Politik Desentralisasi. Graha Ilmu : Bandung.

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian. Salemba Humanika : Jakarta.

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). ITS Press : Surabaya.

Sumber Online :

www.bpkp.go.id/.../DPRD-Kabupaten-Pekalongan-Kunjungi-BPKP-Jateng,Konsultasikan-Nasib-Pasar-Kajen (dipublish pada 14 Juni 2010, diunduh pada 26 November 2011).

suaramerdeka.com/harian/0801/31/pana.html // **DPRD Cabut Interpelasi** // (dipublish pada 30 Januari 2008, diunduh pada 26 November 2011).

suaramerdeka.com/.../Renovasi-Pasar-Tradisional-Masih-Menyisakan-Masalah (dipublish pada 29 Desember 2009, diunduh pada 26 November 2011).

republicmegono.blogspot.com/.../pansus-setujui-renovasi-pasar-kajen... (dipublish pada Sabtu, 17 November 2007, diunduh pada 26 November 2011).

www.pekalongankab.go.id/.../396-pedagang-lama-dijamin-tak-digusur... (dipublish pada Senin, 21 April 2008 pukul 16:25, diunduh pada 26 November 2011).

www.pekalongankab.go.id/.../340-1400-pedagang-lama-diprioritaskan... // (dipublish pada Jumat, 21 Desember 2007 16:23, diunduh pada 26 November 2011).